

PERUMUSAN KEBIJAKAN KURIKULUM

Nurhidaya M.

Mawardi Pewangi

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
nurhidayamukhtar86@gmail.com

Abstract. The purpose of this article is to look at Curriculum Policy Formulation to find out curriculum policies at the level of education units because in the curriculum not only goals must be achieved so as to clarify directions, but also provide an understanding of the learning experiences that each student must have. Curriculum and education are two things that are closely and interrelated, inseparable from each other, because in education, of course, the teaching and learning process (teaching) requires the outlines of educational directions that lead to the achievement of educational goals, as well as the content that must be learned. The article was written with literature review with the result that the curriculum and the teacher must establish a system of assessment that can reveal the learners as a whole, both at the cognitive, affective, and psychomotor levels.

Keywords: Formulation, Policy, Curriculum

How to cite: Nurhidaya M. & Pewangi, M. (2019). Perumusan kebijakan kurikulum. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan KALUNI*, Vol. 2, 663-670. Jakarta: LPPM Universitas Indraprasta PGRI. <http://dx.doi.org/10.30998/prokaluni.v2i0.150>

PENDAHULUAN

Semakin maju suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kini diperlukan pendidikan dengan kurikulum yang mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah, berketerampilan, dan berpengetahuan yang luas agar mampu bersaing di dunia internasional. Pendidikan di Indonesia belum terlepas dari berbagai macam masalah. Salah satu masalah pendidikan di negara kita yang masih menonjol saat ini adalah adanya kurikulum yang silih berganti dan tanpa ada arah pengembangan yang betul-betul diimplementasikan sesuai dengan perubahan yang diinginkan pada kurikulum tersebut. Bahwa kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai salah satu penentu keberhasilan pendidikan. Perubahan kurikulum selalu mengarah pada perbaikan sistem pendidikan sehingga perlu adanya revitalisasi kurikulum. Usaha perbaikan kurikulum tersebut mesti dilakukan demi menciptakan perubahan yang lebih baik untuk sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa sumber dari Artikel ini adalah hasil dari Tugas Individu Mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka melalui mata kuliah Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar.

Artikel ini ditulis berdasarkan kajian beberapa literatur tentang pelaksanaan dan Perumusan Kebijakan Kurikulum 2013 di Indonesia yang penerapan dan Implementasinya dilakukan diberbagai Satuan Pendidikan. Kajian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan Kebijakan Kurikulum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Menurut Mustopodidjaja (2009: 132) dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi publik, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Sedangkan menurut Widodo (2010: 85) implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process* sekaligus studi yang sangat *crucial*). Karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Kebijakan kurikulum di Indonesia secara sederhana dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu masa prakemerdekaan, kemerdekaan, dan reformasi. Berikut ini adalah kaleidoskop kebijakan kurikulum di Indonesia dari masa pra kemerdekaan dimana pada masa ini sekolah sudah mulai dikenalkan meski masih sangat terbatas, sampai pada masa reformasi.

Kebijakan Kurikulum Pendidikan Masa Pra Kemerdekaan

Kebijakan pendidikan pada masa pra kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah, dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam pengembangan usaha melalui kerja paksa, penjajah membutuhkan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, penjajah membentuk lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas, yaitu anak-anak golongan ningrat yang selanjutnya diproyeksikan sebagai pegawai rendahan. Terdapat dua bentuk kebijakan pendidikan pada masa kolonial ini yaitu. Pertama, kebijakan Sekolah Kelas Dua yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis dan membaca. Kedua, kebijakan Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun dan terakhir 7 tahun.

Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pasca Kemerdekaan

Kebijakan kurikulum pendidikan pada masa pasca kemerdekaan, dibatasi sampai pada masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Reformasi membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini diawali dengan terbitnya UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 beserta turunan perundang-udangannya. Kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994. Berikut penjelasan dan gambaran dari turuna perundang-undangan: **(a) kurikulum 1947**, awal terbentuknya kurikulum 1947, namanya adalah Rencana Pembelajaran 1947 atau dikenal dengan sebutan *leer plan* (Kunandar, 2007: 86). Yang menjadi ciri utama pada kebijakan kurikulum 1947 ini adalah kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Pada masa tersebut, siswa lebih diarahkan tentang cara bersosialisasi dengan masyarakat. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Penekanannya adalah menumbuhkan kesadaran bela negara. (Abdullah, 2007: 32); **(b) kurikulum 1952**, kebijakan

kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kebijakan kurikulum ini merupakan lanjutan dari hasil kajian Panitia Penyelidik Pengajaran sebelumnya, dan hasil dari Jawatan Pengajaran di Surakarta yang telah menyusun rencana pelajaran terurai pada tahun 1947 namun belum sempat dilaksanakan dan baru dapat dikemukakan lagi sebagai rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Rencana pelajaran terurai ini merupakan respond dan hasil penyesuaian dengan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran (Tilaar, 1995: 254). Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan; **(c) kurikulum 1964**, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini, kebijakan yang diambil adalah bernama Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pantja Wardhana (Pancawardhana) yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Sholeh, 2013: 4). Prinsip-prinsip Pantja Wardhana sebagai sistem pendidikan adalah 1) perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional internasional/keagamaan, 2) perkembangan kecerdasan, 3) perkembangan emosional artistic atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, 4) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan, dan 5) perkembangan jasmani. (Tilaar, 1995: 256); **(d) kurikulum 1968**, kebijakan kurikulum 1968 merubah struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan; **(e) kurikulum 1975**, kebijakan kurikulum 1975 menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. setiap guru harus secara detail merencanakan pelaksanaan program belajar mengajar. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap. (Kunandar, 2007: 87); **(f) kurikulum 1984**, kebijakan kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Kurikulum 1984 ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya (kurikulum 1975). Kurikulum 1984 mempunyai ciri-ciri 1) berorientasi pada tujuan pembelajaran (intruksional), 2) pendekatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL), 3) materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, 4) menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, 5) Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, 6) menggunakan pendekatan ketrampilan proses (*process skill approach*) (Kunandar, 2007: 88); **(g) kurikulum 1994**, kebijakan terhadap kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Pada Kurikulum ini menekankan pada prinsip *Link and Match* pada sekolah kejuruan seperti STM (Sekolah Teknik Menengah). *Link and Match* adalah prinsip tentang pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja atau industri.

Kebijakan Kurikulum Masa Reformasi

Reformasi membawa dampak besar bagi perkembangan pendidikan nasional. Dengan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menjadi babak baru bagi sistem pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan pendidikan pun dikeluarkan sebagai amanat undang-undang. Sampai saat

ini, kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan pada masa reformasi dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu kebijakan kurikulum 2004 berupa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan kurikulum 2013. Berbagai perubahan tersebut merupakan bentuk respon dan perkembangan terhadap berbagai perubahan yang dihadapi baik dalam sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan Ilmu pengetahuan dan teknologi Berikut Turunannya berdasarkan Undang-undang; **(a) kurikulum 2004 (KBK)**, kebijakan kurikulum 2004 dikenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar *performance* yang telah ditetapkan. Diantara karakteristik utama KBK yaitu: menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa, Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual; **(b) kurikulum 2006 (KTSP)**, kebijakan kurikulum 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan Karangka Dasar (KD), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan KTSP meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerahnya; **(c) kurikulum 2013**, kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang no. 20 tahun 2003 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia, dengan sistem dimana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar.

Kebijakan Kurikulum 2013

Kurikulum memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis. Meskipun bukan satu-satunya faktor utama keberhasilan proses pendidikan, kurikulum menjadi petunjuk dan arah terhadap keberhasilan pendidikan. Kurikulum menjadi penuntun (*guide*) para pelaksana pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuannya dalam mengembangkan dan menjabarkan berbagai materi dan perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan yang baik adalah yang mampu memahami kurikulum dan mengimplementasikannya pada proses pembelajaran. Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan (*religious culture*) di sekolah.

Karakteristik Kurikulum 2013

Menurut Sofan Amri (2013), dalam bukunya dijelaskan bahwa kurikulum 2013 memiliki karakteristik diantaranya; (1), isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran, (2) kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran, (3) kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD/MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, (4) kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dijenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual (kemampuan kognitif tinggi), (5) kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (*organizing elements*) Kompetensi Dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti, (6) kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi *horizontal* dan *vertikal*) diikat oleh kompetensi inti, (7) silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema (SD). Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut, (8) rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut.

Urgensi Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013

Penjelasan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada Bagian konsideran dijelaskan bahwa pentingnya dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, dan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional ini adalah pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Pada pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa “Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.” Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 35 dinyatakan bahwa “kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.” (UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 BAB IX, Pasal 35, ayat 2)

Elemen Perubahan Kurikulum 2013

Dikutip dari kesimpulan jurnal Purnawati salah seorang Widyaiswara Balai Diklat Padang bahwa, perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 ini memang merupakan suatu langkah maju dari pemerintah Indonesia untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan berkualitas. Baik dan berkualitas ini ditinjau dari segi penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan, dan juga dimilikinya karakter yang mampu memperbaiki citra bangsa Indonesia yang bermartabat. Kurikulum 2013 diciptakan sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Dalam implementasi kurikulum 2013 ini tentunya guru dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari pendidik ini sangat diperlukan agar dapat melaksanakan kurikulum 2013 sesuai dengan amanat kurikulum. Bukankah untuk menciptakan generasi berpengetahuan tinggi, berketerampilan, dan berkarakter bagus diperlukan guru yang pengetahuan, keterampilan, dan karakternya dapat diandalkan. Rasanya akan menjadi mustahil jika guru yang berpengetahuan terbatas, tidak memiliki keterampilan mengajar yang baik, dan berkarakter negatif akan dapat menciptakan generasi

yang baik. Untuk ini, implementasi kurikulum 2013 ini menuntut guru untuk mengubah paradigma negatif tentang kurikulum sehingga dengan terbuka melaksanakan kurikulum 2013 ini sesuai dengan yang seharusnya. Di samping itu, guru juga perlu meningkatkan kualitas dirinya agar pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan profesionalismenya.

Perubahan Kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menyangkut empat elemen perubahan kurikulum (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013: 11-12) yaitu *pertama* Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills dengan mengasah 3 aspek, yaitu : sikap, pengetahuan, dan keterampilan. *Kedua* Standar Isi (SI), yaitu pada perubahan SI dimana pada KTSP 2006 kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, pada kurikulum 2013 mata pelajaran diturunkan dari kompetensi. Sedangkan pendekatannya sama-sama dilakukan melalui pendekatan mata pelajaran. *Ketiga* Standar Proses, yaitu yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan pendekatan scientific yaitu mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mengeksplorasi (*exploring*), mengasosiasi (*associating*), dan mengkomunikasikan (*communicating*). Proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekolah, alam, dan masyarakat. Posisi guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran dimensi sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan guru. *Keempat* Standar Penilaian. Penilaian yang dilakukan adalah berbasis kompetensi yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes untuk mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja agar menuju penilaian otentik yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil, diantaranya; (1) tematik Integratif, Pembelajaran berbasis tematik integratif yang diterapkan pada tingkatan pendidikan dasar ini menyuguhkan proses belajar berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran lainnya, (2) enam Mata Pelajaran, Untuk sekolah dasar, saat ini ada sepuluh mata pelajaran yang diajarkan. Namun, dalam kurikulum 2013 mata pelajaran dipadatkan menjadi enam mata pelajaran, (3) pramuka sebagai Ekstra Kurikuler Wajib. Dalam kurikulum 2013, pramuka merupakan ekstra kurikuler wajib dan itu diatur dalam undang-undang. Pramuka ini menjadi ekstra kurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah, untuk berbagai jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan layanan secara profesional, maka dalam implementasi pramuka kemendikbud bekerjasama dengan kemenpora, (4) bahasa Inggris Hanya Ekskul. Sebelumnya terjadi polemik mengenai bahasa Inggris di SD, yaitu bahasa Inggris akan dihapus dari kurikulum. Rencana penghapusan ini didasari oleh kekhawatiran akan membebani siswa dan memprioritaskan terhadap penguasaan bahasa Indonesia. Ternyata, dalam kurikulum 2013 ini, bahasa Inggris menjadi ekstra kurikuler bersama PMR, UKS, dan Pramuka.

Implikasi Perubahan Kurikulum 2013 Dalam Sistem Pembelajaran

Perubahan kurikulum 2013 membawa implikasi pada sistem pembelajaran yang dilakukan. Implikasi perubahan kurikulum 2013 tersebut meliputi empat hal yaitu model pembelajaran berupa tematik-integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik. (1) model pembelajaran tematik terpadu, yaitu Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. (Kemendikbud, 2013: 3), (2) pendekatan saintifik (*scientific approach*, yaitu pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang dilakukan agar peserta

didik secara aktif mampu menyusun konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik simpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan” tersebut. (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013 : 7)

Proses pembelajaran berbasis pendekatan saintifik tersebut meliputi lima tahap yaitu mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mengumpulkan informasi (*explore*) atau mencoba (*experimenting*), mengasosiasi (*associating*), dan mengkomunikasikan (*communicating*), (3) Strategi pembelajaran aktif, yaitu permendikbud nomor 81A Tahun 2013 memberikan pedoman bahwa strategi pembelajaran kurikulum 2013 diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Sehingga menumbuhkan kreativitas, kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa. Penilaian otentik

PENUTUP

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, kebijakan kurikulum di Indonesia secara sederhana dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu masa pra kemerdekaan, kemerdekaan, dan reformasi, titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan, karakteristik kurikulum 2013 yaitu Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (*organizing elements*) Kompetensi Dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti, pada pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa “Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan, perubahan Kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menyangkut empat elemen perubahan kurikulum yaitu *pertama* Standar Kompetensi Lulusan (SKL), *Kedua* Standar Isi (SI), *Ketiga* Standar Proses dan yang *Keempat* Standar Penilaian, perubahan kurikulum 2013 membawa implikasi pada sistem pembelajaran yang dilakukan. Implikasi perubahan kurikulum 2013 tersebut meliputi empat hal yaitu model pembelajaran berupa tematik-integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Sopan (2013). *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Umum Implementasi Kurikulum 2013*, Jakarta; Kementerian Agama RI, 2013

- Doll, Ronald C. *Curriculum Improvemet Decision Making And Process*, Boston: Nallyn Bacon, 1996
- Hidayat, Sholeh. *Pengembangan Kurikulum Baru*, Bandung: Rosda, 2013
- Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007
- Kemendikbud, *Bahan Ajar Pengelolaan Pembelajaran tematik*, Jakarta: Kemendikbud, 2013
- Kunandar, *Implementasi Kurikulum KTSP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Oliva, Peter F. *Developing the Curriculum*, New York: HarperCollins Publisher, 1992
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 81A tentang Implementasi Kurikulum, 2013
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Raharjo, Rahmat. *Pengembangan & Inovasi Kurikulum*, Yogyakarta: Baituna Publishing, 2012
- Soetopo, Hendyat. dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Tilaar, H.A.R. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945 – 1995*, Jakarta, Grasindo, 1995
- Zaini, Muhammad (2009). *Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: TERAS.